

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) KECAMATAN PALU TIMUR DI KOTA PALU

Nirwana

nir@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims to analyze the policy implementation the mayor of City Regulation Number 11, 2011 about the Guideline of Society Empowerment Regional Program of East Palu Sub-istrict Palu City, This Research employed equality method. It was carried out in Tondo and Talise. East Palu Sub-district. The Informants of this research were bureucrac staff, local people, and the elderly people. Technique of ata collection was observation, interview, and library study. The research result shows that commnucation between the office and stakeholders in implementation the policy was not effective, In addition the resourches of the program Implementation had enaught quality. Dispotition and bureaucracy Structure of the proram implementation were important to was urgent to increase society capacity, not get for individuals but also for groups to solve problems for increasing life quality, self – creativity, an prosperity. Therefore, increasing the effectiveness quality of the city chief regulation policy implementation was actually supported by the four faktors mentioned above.

Keywords: *Policy Implementation, Proverty, Resources, disposition, and bureaucrazy structure.*

Permasalahan kemiskinan telah menjadi perhatian utama diperbagai kalangan baik Pemerintah, pemerhati sosial, profesionalisme dan stakeholder lainnya, berbagai bentuk kebijakan, strategi, komitmen dan kebijakan dituangkan sebagai langkah proaktif dalam penanggulangan kemiskinan diberbagai wilayah yang telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal.

Salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, Pemerintah membuat terobosan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dan program-program yang pro-rakyat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat miskin memang terlihat hasilnya tapi tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat yang pro pemberdayaan dan tidak ingin melihat bangsa ini sebagai bangsa peminta-minta yang dapat mematikan kreatifitas rakyat. Bahkan dinilai upaya yang dilakukan pemerintah secara perlahan-lahan merupakan proses pembodohan kepada rakyat, karena rakyat hanya diberi (*charity*)

bukan didorong melalui kegiatan usaha agar mampu diberdayakan (*empowerment*) dan mandiri.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan menunjukkan adanya fenomena yang dilematis pada implementasi program dan kegiatan, karena dalam implementasi kebijakan tersebut dalam efektifitas komunikasi antar dinas terkait dan *stakeholders* yang menjadi unsur penting, terutama terkait dalam pemanfaatan dana anggaran program daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talise dan Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur di Kota Palu. Hal yang menjadi penting adalah faktor dukungan sumber daya dan birokrasi relatif lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang telah diamanahkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

Dari pengamatan lain di lapangan peneliti menemukan bahwa Lurah tidak mengetahui tentang peran dan fungsi sebagai

Penanggungjawab Operasional Kegiatan dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan , sehingga Lurah membiarkan Masyarakat mengelola sendiri dari dana tersebut sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang membuat kepercayaan masyarakat dengan program ini tidak ada, misalnya Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan program dan kegiatan PDPM menganggap bahwa Dana PDPM mereka anggap sebagai suatu mata pencaharian sehingga program dan kegiatan yang mereka laksanakan tidak berkualitas, padahal dana yang mereka gunakan cukup besar, sehingga dalam implementasinya tidak sesuai dengan prosedur, strategi, prinsip dasar dan pendekatan pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat, lembaga keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini terjadi dimana lembaga kepemimpinan masyarakat yang diurus oleh orang yang tidak berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai – nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskannya.

Peneliti melihat pentingnya upaya pemerintah dan semua pihak yang terkait secara konsistensi menuju arah perbaikan agar program dan kegiatan lebih dapat dipertanggung jawabkan dalam implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) untuk dimasa yang akan datang.

METODE

Dalam penelitian kualitatif, deskripsi argumentasi terhadap fenomena kajian penelitian lebih bersifat pemanfaatan kata-kata dalam menggambarkan sebuah kejadian. Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini berbentuk sebuah kejadian. Data

yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini berbentuk kata-kata ketimbang angka-angka (Miles dan Huberman, 1994 : 1) mengatakan bahwa data kualitatif adalah yang paling baik dalam konteks analisis secara *kualitatif*, kaya dengan deskripsi dan penjelasan yang berkaitan dengan konteks secara lokal.

Metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut pandangan mereka, pendekatan ini diarahkan kepada latar dan individu secara holistic (utuh). Dengan demikian, dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dengan demikian, dalam penelitian bersifat kualitatif deskriptif yang didasarkan pada logika berpikir secara induktif, seorang peneliti perlu lebih memahami fenomena sosial secara empiris dilapangan (*field research*). Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada logika fenomena sosial faktual, tetapi lebih pada tataran pemahaman (*verstehen*) secara mendalam terhadap fenomena sosial didalam masyarakat.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memakai model Miles dan Huberman (1994:10-12) analisa data kualitatif dilakukan melalui tiga proses tahapan, yaitu *Data Reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*, *Pertama*, *data Reduction* merupakan suatu proses seleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data-data yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan kajian penelitian. Hal ini dilakukan, karena dalam penelitian kualitatif pada umumnya mengumpulkan data jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, mereduksi data yang amat penting dilakukan, karena dalam penelitian kualitatif pada umumnya mengumpulkan data jumlahnya

cukup banyak. Oleh karena itu, mereduksi data amat penting dilakukan dengan beragam alat catatan, melalui *note book* dan komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini. *Kedua, data display* (penyajian data) merupakan deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Menurut Miles dan Huberman (1994) dalam penelitian kualitatif penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. *Ketiga, conclusion :drawing / verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dengan demikian kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan Data (*data collection*) berikutnya. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel, hal inilah sebagai langkah verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan program ditempuh beberapa langkah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan khususnya kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut George C. Edward III yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Implementasi program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja dengan mendorong

kemandirian masyarakat yang mempunyai dampak langsung yang didukung oleh sumber daya yang ada dan memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Komunikasi

Pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya dapat dikerjakan karena keputusan tersebut merupakan perintah yang dilaksanakan, komunikasi yang baik, cermat dan akurat dan dapat dipahami oleh pelaksana merupakan suatu keberhasilan pelaksanaan program. Informasi yang menyangkut Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat baik melalui publikasi maupun sosialisasi.

Komunikasi juga merupakan suatu alat penyebarluasan informasi dari atas kebawah atau dari bawah keatas, yang menggambarkan adanya hubungan antara pemerintah setempat sebagai atasan dan masyarakat penerima manfaat sebagai bawahan.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Palu tidak konsisten, dan awal sosialisasi sudah digaungkan untuk menyiapkan proposal yang nilainya yang sudah ditetapkan yaitu Rp.127.000.000,- tapi tidak mampu direalisasikan, kondisi ini mengundang pro-kontra masyarakat, baik dari Kelurahan, Anggota KMS, TPM maupun Masyarakat sebagai penerima manfaat. Deny Dahlan salah seorang Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam program ini mengatakan :

Bahwa terjadinya pergeseran dana tersebut karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memegang dana PDPM tidak mampu merealisasikan seluruh anggaran yang telah dijanjikan karena sebagian dana pembiayaannya disalurkan ke daerah-daerah konflik dan bencana alam yang ada di Kota Palu.

Meskipun demikian, Optimalisasi pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010 cukup efektif karena pengelolah keuangan dan pengerak ada pada Bappeda Kota Palu. Hal ini menjadi masalah karena terjadinya kesalahan komunikasi antara dinas terkait dalam perubahan kewenangan pengelolaan keuangan dan anggaran program tersebut.

Dalam perjalanannya program ini tidak lagi sebatas menangani program yang tidak terakomodir oleh Musrenbang dan batas besarnya anggaran tiap jenis pekerjaan, tapi meluasnya ke usulan-usulan yang lain selama tidak masuk dalam daftar negative list. Sebagaimana dikatakan oleh ketua KMS Kelurahan Talise Ir. Muh. Nadjib Massikki, MM, bahwa:

Sosialisasi itu perlu dilakukan sebelum pelaksanaan dilapangan, masyarakat diberi pengertian secara berkesinambungan apa maksud dan tujuan dari pada Program ini karena sosialisasi merupakan proses untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisa data diatas menunjukkan dampak atas informasi melalui sosialisasi karena sebahagian informan menyatakan bahwa sosialisasi itu perlu sebagai upaya memperkenalkan atau menyebarkan informasi mengenai keberadaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dan lembaga-lembaga pengelola kepada masyarakat sebagai kelompok pemanfaat langsung maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada pelaku dan instansi atau lembaga pendukung di tingkat Kota Palu.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan suatu program dikatakan berhasil apabila ditunjang Sumber daya yang memadai bukan hanya mempunyai kemampuan partisipatif tetapi harus ditunjang dengan kemampuan teknis, moral dan konsisten pada ketentuan-ketentuan dan aturan norma serta mempunyai tanggung jawab. Sumber daya merupakan pelaksana

sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program.

Masyarakat kelurahan Talise ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial yang heterogen, kehidupan ekonomi masyarakat masih berstatus pra sejahtera sebahagian lagi tingkat ekonominya sudah cukup baik, kondisi ekonomi yang kurang baik disebabkan oleh pengetahuan dan pemanfaatan peluang ekonomi serta sumber daya manusia yang "masih rendah". Hal ini di tegaskan oleh Ketua KMS Kelurahan Talise Bpk. Ir. Muh. Nadjib Massikki, MM, bahwa:

Seorang pengurus PDPM dalam hal ini KMS tidak hanya mampu membangun partisipasi masyarakat tetapi pengurus KMS itu harus sifat amanah, sukarela, dan bisa membaca situasi di lapangan dan harus mempunyai kemampuan teknik, misalnya pada pembuatan Drainase yang panjangnya 250 m anggota KMS harus mampu menghitung berapa jumlah material yang dibutuhkan.

Sementara itu, Mahir seorang anggota Kelompok Masyarakat (KMS) Kelurahan Tondo memberikan pendapatnya terkait dengan kemampuan Sumber Daya dalam memimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011, bahwa :

Kondisi yang ada dilapangan ketika Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) memberikan kepercayaan kepada KPDL dan Penerima Manfaat untuk mereka pekerjaan ternyata mereka tidak mempunyai kemampuan dalam hal itu sehingga kualitas pekerjaan itu sendiri kurang bagus, KPDL dan Penerima manfaat beranggapan bahwa dana tersebut adalah uang pemerintah atau dana hibah sehingga mereka tidak punya tanggung jawab dan kerja asal-asalan.

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana umum, pengembangan usaha

bantuan peralatan usaha, peningkatan ketrampilan usaha, kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia atau *Capacity Bulding*. Pada intinya bahwa Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dilaksanakan untuk menambah jumlah infrastruktur yang dimiliki oleh kelurahan yang pada akhirnya untuk menambah infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu.

Dari beberapa wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh KMS, sehingga dalam implementasi kebijakan PDPM tidak terlaksana dengan baik, karena tidak didukung oleh skill atau kemampuan yang memadai serta tidak mempunyai sikap universal, sehingga dalam implementasi kebijakan bila tidak didukung dengan kemampuan teknis atau skill maka menimbulkan hambatan, sehingga dalam peran dan peluang masyarakat semakin kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Disposisi

Disposisi merupakan dukungan sikap seorang implementor dalam proses implementasi Kebijakan Publik dalam berbagai kegiatan dan program. Jika implementasi efektif maka para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya. Implementor menggunakan otoritasnya terhadap masalah yang kompleks yang cenderung sikap mereka mengacu pada kebijakan-kebijakan tersebut.

Sikap dari orang yang diberi amanah adalah orang-orang seharusnya yang peduli, memiliki komitmen, kuat, ikhlas, tanpa pamrih dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tentu saja bukan merupakan sesuatu hal yang mudah karena upaya dalam membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat. Salah seorang anggota Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) Kelurahan Talise Ir.

Muhamad Nadjib Massikki, MM, mengatakan bahwa:

Seorang anggota KMS haruslah seorang yang mempunyai loyalitas, amanah, sifat sukarela dan mau berkorban, serta bisa membaca situasi di lapangan, dan diharapkan bagi anggota KMS tidak mencari keuntungan dan dari program penanggulangan kemiskinan seperti PDPM dan diharapkan program ini dapat berkesinambungan sehingga masyarakat lebih merasakan pemanfaatan dari program ini (Wawancara, di Palu, Nopember 2013).

Ada hal yang menarik bagi penelitian ini di Kelurahan Talise, program – program yang ada di Kelurahan Talise terjadi komunikasi yang baik misalnya PNPM-Mandiri dengan PDPM, dimana PNPM-Mandiri menangani khusus pada Sosial-Budaya dan Ekonomi Produktifnya sedangkan PDPM menangani hanya satu bidang saja yaitu Bidang Lingkungan / Infrastruktur. Seperti yang diungkapkan oleh Ir. Nadjib Massikki, MM bahwa dalam pengelolaannya ada kenyataan teknis yang jarang dimiliki oleh Kelurahan lain yaitu bila ada kesisiaan dari Dana PDPM, KMS Kelurahan Talise mengerjakan Usulan yang tidak termasuk dalam proposal tersebut.

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan itu dikatakan berhasil apabila ada kerja sama yang baik dari seluruh perangkat organisasi tersebut, karena suatu kebijakan yang melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya. Sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga lembaga terkait yang mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatannya.

Koordinasi kebijakan dari program penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor Oriented*) merupakan hal yang penting dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, koordinasi dilakukan Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyamakan setiap keputusan agar tidak

mengalami benturan atau inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah baik Provinsi maupun Kota / kabupaten.

Hasil analisa data menunjukkan kegiatan monitoring dan evaluasi pada dua kelurahan terlaksana secara efektif yang merupakan langkah Pemerintah Kota Palu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) khusus pada Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore terhadap implementasi PDPM pada setiap kelurahan sebagai wilayah kegiatan program.

Mekanisme Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat

Upaya dalam mencapai meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sesuai Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011, adapun mekanisme dari pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

Kelembagaan

1. Masyarakat

Lembaga pelaksana program adalah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat kelurahan dikoordinir oleh Lurah. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki kekuatan hukum yang dapat melaksanakan pembangunan secara partisipatif pada tingkat kelurahan.

2. Pemerintah

Unsur Pemerintah yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ini adalah seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis maupun non teknis pada Pemerintah Kota Palu yang memiliki kaitan atau hubungan dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh lembaga kemasyarakatan melalui Lurah masing-masing.

Mekanisme (sosialisasi dan usulan)

1. Sosialisasi

Sosialisasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDMP) merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dan lembaga-lembaga pengelola kepada masyarakat sebagai kelompok pemanfaat langsung maupun kelompok masyarakat lainnya kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung di tingkat Kota Palu.

2. Kelompok Masyarakat Setempat (KMS)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KMS membuat nota kesepakatan dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Palu selaku Pengguna Anggaran.

3. Usulan Kegiatan

Pengusulan kegiatan PDPM tidak termasuk pengusulan modal usaha dalam bentuk tunai atau sifatnya bergulir atau pembiayaan pemeliharaan infrastruktur, PDPM dilaksanakan untuk menambah jumlah infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah kota Palu

4. Pembiayaan

Sistem penyaluran dana dimaksud melalui mekanisme pemberian dana langsung kepada KMS untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum yang selanjutnya didistribusikan kepada Kelompok Peduli. Serta pemberian peralatan / barang bagi kegiatan pengadaan peralatan / barang.

5. Pelaksanaan dan sistem pelaksanaan

Program Pembangunan Kelurahan Berjangka (PPKB) dibangun dari 2 (dua) informasi program yang mencakup : prioritas usulan hasil Musrenbang yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan (*pro poor Oriented*), program / kegiatan yang belum terpenuhi oleh program pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada saat sosialisasi dan *review program* tingkat kelurahan dilaksanakan, masing-masing kelurahan menyiapkan hasil Musrenbang sampai dengan tahun berjalan yang belum terpenuhi oleh SKPD teknis Kota Palu guna membahas secara bersama pada saat rebug warga *review program* dalam rangka penentuan prioritas usulan program/kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan PDPM dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011.

Faktor Pendorong (Kekuatan)

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya dukungan positif baik dari elite politik sampai kepada masyarakat, dan diharapkan program ini dapat berkesinambungan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Sesuai hasil wawancara dengan Informan Kunci Presley Tampublong, SE menekankan beberapa aspek penunjang Utama yaitu :

- (1) Bagaimana kemauan masyarakat untuk melaksanakan fungsi mekanisme kelembagaan-kelembagaan yang ada ditingkat Kelurahan. Misalnya Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) bekerja sama dengan Dinamisator / pengarah sistem kemasyarakatan dan apabila mereka tidak bergerak dengan sistem yang ada maka KMS tidak bisa membaca persoalan-persoalan yang ada dikelurahan untuk ditangani setiap tahunnya tetapi bila mereka bergerak dengan optimal maka akan lebih cepat penanganannya.
- (2) Kebijakan Pemerintah membuat peran keterlibatan masyarakat secara partisipan dan swadaya.

Proses kesiapan masyarakat pada kondisi tiap tahunnya membuat skedule yang taat pada administrasi APBD, proses-proses tahapan ini dilakukan dengan konsisten oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Faktor Penghambat (Kelemahan)

Kelemahan Implementasi Kebijakan Program Daerah Pemberdayaan pembangunan sosial guna mengentaskan kemiskinan, tidak hanya tanggung jawab Pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder lainnya mulai dari Pemerintah Daerah, pelaku bisnis, aktivis lembaga swadaya masyarakat. Dari olahan wawancara yang dilakukan ada kelemahan-kelemahan unsur belas kasihan (*charity*) sehingga kualitas pekerjaan itu tidak bagus. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Palu Presley Tampublong, SE. Sebagai Informan Kunci bahwa:

- (1) Tingkat kesiapan warga pada tingkat Kelurahan ketika Rebug Warga dilaksanakan dalam rangka mengali kebutuhan sesuai dengan potensi dan permasalahan riil di masyarakat masih banyak terjadi tarik menarik masalah dalam menetapkan kegiatan prioritas kegiatan berdasarkan indikator kemendesakan, dampak dan pemanfaatannya.
- (2) Lintas SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai multi sektor tidak hanya dilakukan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Palu tetapi harus di *back up* oleh SKPD lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi yang mengalami ketidakefektifan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Walikota tersebut. Komunikasi sebagai faktor utama dalam menjalankan unsur jenjang birokrasi dalam menjalankan fungsi pokok para implementator kebijakan tersebut. Komunikasi antar dinas terkait dan stakeholders dalam pendistribusian anggaran menjadi masalah penting dalam kelangsungan

implementasi kebijakan Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011.

Faktor sumber daya: masyarakat, dan pendamping program tersebut mengalami ketidakefektifan karena minimnya pemahaman terhadap peraturan Walikota Palu tersebut, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan dan mematuhi kebijakan tersebut mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, birokrasi pada konteks ini pula menjadi pendung utama sebagai implementator kebijakan tersebut. Meskipun demikian, struktur birokrasi dalam program daerah pemberdayaan masyarakat di kelurahan Talise dan kelurahan Tondo mengalami ketidakefektifan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011 itu, bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya hendaknya berpatokan pada peraturan tersebut.

Rekomendasi

1. Perlunya Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan sehingga masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan PDPM ini karena dengan sosialisasi merupakan proses untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Perlunya penegasan diberlakukan Peraturan Walikota Palu Nomor 11 tahun

2011 secara konsisten dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas Sumber daya manusianya.

3. Perlunya dukungan SKPD teknis terkait agar dapat melakukan koordinasi (*cross check*) pada tataran Pemerintah Kelurahan diwilayahnya dalam pemanfaatan dana BLM yang tepat sasaran pada implementasi kebijakan dari PDPM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pembimbing I Dr. Muzakir Tawil, M.Si, Pembimbing II Dr. Iman Sofyan, M.Si. dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si. atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Edward III, George. C.1980, *Impelementing Public Policy*. Washington: Congressional Quaterly Press.
- Miles, B Matthew and Huberman A, Michael., 1994. *Qualitative data Analysis: An Expanded Sourcebook* (second Edition). New Delhi: SAG Publications.
- Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan masyarakat (PDPM) Tahun 2011.